

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, dimana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh termasuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani pada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan input yang ada. Diantara input tersebut yang terpenting adalah penyediaan anggaran pelaksanaannya. Penyediaan anggaran dimaksud tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- Renja SKPA merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh

(RKPA).

- Renja merupakan acuan SKPA untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015
- Renja SKPA merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh pada tahun 2015 ini merupakan awal tahun dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah Aceh, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPA harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka pelaksanaan Renja SKPA meliputi antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPA tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMA.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPA harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparaturnya Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga selaras dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.
2. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh tahun 2015.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menciptakan sinergi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
2. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2015, meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA**

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan di Bidang Pemantapan Ideologi Kesatuan Bangsa, Politik Pemerintahan dan Keamanan, Politik Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam rencana kerja tahun 2013 terdapat 1 urusan wajib pemerintahan yang terdiri dari 7 program dan 22 kegiatan. Secara umum pencapaian kinerja kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Aceh rata-rata di atas 75% bahkan pada beberapa kegiatan mencapai 99%. Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2013 :

#### **1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

##### **a. Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah.**

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kajian terhadap Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah terkini yang disusun oleh Tim Pengkajian Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah dengan hasil yang dicapai :

- Tersedianya hasil kajian terhadap pengembangan keamanan
- Tersedianya hasil kajian terhadap isu qanun lambaga dan bendera
- Tersedianya hasil kajian terhadap perkembangan Pemilu 2014
- Tersedianya hasil kajian terhadap penentasan kemiskinan

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 84.800.000,- (84,80%).

- b. Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi pemantauan keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing yang dilaksanakan di Provinsi sesuai dengan Permendagri No. 49 Tahun 2010 dan Permendagri No 50 Tahun 2010. Hasil yang dicapai adanya dokumen orang asing dan tenaga asing yang melakukan aktifitas di Aceh.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 31.921.000,- (31,92%).

- c. Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelajar dan Aparatur Pemerintah di Kota Subulussalam. Hasil yang dicapai meningkatnya pemahaman dengan berbagi informasi antara sesama peserta dalam penanggulangan bahaya laten miras dan narkoba

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 92.916.000,- (92,92%).

- d. Koordinasi penanganan konflik

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat rutin, Rakor dan Sosialisasi terhadap penanganan gangguan keamanan daerah dan penanganan konflik sosial seperti SARA dan lahan sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2013.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Meredamnya potensi konflik di masyarakat
- Terkendalinya gangguan keamanan di daerah
- Terlaksananya inpres No. 2 Tahun 2013
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap gangguan dan potensi timbulnya konflik sosial di masyarakat



Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 450.000.000,- realisasi keuangan Rp. 278.574.800,- (61,91%).

## 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

### a. Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi ke Kabupaten/Kota dan bantuan hukum bagi masyarakat yang dilakukan pada korban konflik di 10 Kab/Kota.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Adanya peningkatan pemahaman terhadap HAM dan Hak-hak Bantuan Hukum bagi Masyarakat korban konflik
- Bantuan hukum korban konflik diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari korban konflik dalam bentuk sosialisasi untuk memperoleh bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.088.694.350,- (98,97%).

### b. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Adanya peningkatan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama
- Adanya keharmonisan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
- Tidak terjadi serta menghindari konflik antar umat beragama

Anggaran yang tersedia sebesar Rp 200.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 197.840.000,- (98,82%).

### 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

Dilaksanakan dalam bentuk dialog kebangsaan, dialog pemantapan ideologi kebangsaan dan bela negara, pemantapan wasbang, hak-hak bantuan hukum dan HAM bagi masyarakat dan pemeliharaan pemberdayaan masyarakat melalui dialog interaktif RRI Banda Aceh. Dialog tentang rancangan qanun Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemantapan Wasbang dan tentang Pemeliharaan Kerukunan Kehidupan Beragama melalui TVAceh.

Tujuan melaksanakan kegiatan ini adalah

- Terjadi dialog antara narasumber dengan pemirsan TV dan pendengar RRI;
- Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap hal tersebut diatas

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 375.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 374.030.200,- (99,74%).

b. Pemantapan ideologi dan bela negara.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparatur Pemerintahan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap ideologi dan bela Negara;
- Adanya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 350.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 349.870.400,- (99,96%).

#### 4. Program Pemberdayaan Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

a. Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dengan aparat kecamatan yang membidangi ketertiban umum, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP dan WH serta Badan Kesbangpol dan Linmas setempat yang bertujuan meningkatnya koordinasi dengan Provinsi dengan Kab/Kota dan lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan Linmas di Kab/Kota.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp 147.500.000,- sedangkan realisasi keuangan Rp 136.463.600,- (92,52%).

b. Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap perangkat gampong dan aparat keamanan di 7 Kab/Kota yang diikuti oleh Satuan Linmas Gampong, Geuchik, Imum dan Tuha Peut

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Meningkatkan rasa tanggung jawab Satlinmas
- Mewujudkan ketentraman dan keamanan dilingkungan masyarakat

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 361.048.400,- (90,26%).

c. Penyelenggaraan gampong sadar hukum.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat/cerdik pandai, tokoh pemuda/perempuan sebanyak 60 orang di 10 Kab/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Terjadinya peningkatan pemahaman arti hukum dan perlakukannya ditengah-tengah masyarakat
- Terciptanya gampong yang memiliki masyarakat sadar akan tatanan kehidupan bermasyarakat

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 450.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 431.939.500,- (95,99%).

## 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

### a. Sosialisasi kebijakan politik pemerintah Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap kebijakan politik pemerintah Aceh terkait pengembangan politik daerah terkini dan pengembangan kondisi dan situasi daerah berupa lahirnya qanun-qanun Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjalinnya sinergisitas kebijakan politik pemerintah Aceh dengan pemerintah Kab/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya khususnya dalam pemahaman terhadap lahirnya qanun – qanun Aceh.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 510.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 455.554.075,- (89,32%).

### b. Fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan teknik terhadap langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, kewajiban partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota parpol dan masyarakat, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, kewenangan parpol dalam hal terjadinya PAW. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Meningkatnya hak dan kewajiban Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatnya kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan;
- Maksimalnya fungsi parpol, baik fungsi terhadap masyarakat maupun terhadap serta mampu mengembangkan sistem politik yang demokrasi yang dilandasi etika dan budaya politik berazaskan Pancasila

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 239.051.550,- (95,62%).

c. Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan teknik berkaitan dengan peran serta, hak dan kewajiban masyarakat dalam berpolitik, peran masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak politik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Meningkatkan kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam rangka berpolitik
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik dalam pemilu

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 229,571,095,- (91.83%).

d. Penguatan kapasitas politik perempuan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan partisipasi perempuan baik dalam kepengurusan parpol maupun keterwakilan di lembaga legislatif;
- Meningkatkan kesadaran berpolitik, kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 394,321,000,- (98.58%).

e. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan UU Ormas, yaitu UU No. 27 Tahun 2013 dimana fungsi ormas adalah sebagai sarana penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, sebagai penyalur aspirasi masyarakat sehingga terjadinya pemenuhan pelayanan sosial dalam

memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- Adanya perkembangan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam bermasyarakat.
- Melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Paham lagu kebangsaan, tahu lambang kebangsaan)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 247,194,000,- (98.88%).

f. Koordinasi pembauran kebangsaan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka mensikronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar kabupaten/kota dengan provinsi dalam rangka mencari solusi perencanaan pembangunan kebangsaan.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 130.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 129,995,300,- (99.99%).

## 6. Program Pengembangan Data dan Informasi

a. Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan dan pengolahan data-data terkait konflik dan kekerasan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Tersedianya dokumen konflik
- Tersedianya dokumen pemantauan kekerasan yang terjadi di Aceh bekerja sama dengan SNPK pusat

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 48.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 40.720.000,- (84,83%).

## 7. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh

### a. Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh dan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka survey dan laporan Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Terlaksananya kegiatan FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 4 Kabupaten
- Adanya dokumen hasil survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 455.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 300.344.804,- (66,01%).

### b. Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Seminar Capaian Penanganan Konflik Aceh berbasis data SNPK dan Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Memperkenalkan sistem nasional pemantauan kekerasan kepada Badan Kesbang se Aceh, SKPA, Ormas dan LSM
- Terlaksananya Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 2 Kabupaten dengan kesimpulan dan pemahaman terhadap penanganan konflik Aceh

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 455.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 327.753.600,- (72,03%).

### c. Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembuatan interior ruang display memorial perdamaian Aceh dan Pembuatan dan penggandaan film Memorial perdamaian Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Tersedianya ruangan Display Memorial Perdamain Aceh

- Tersedianya Film Dokumenter Memorial Perdamain Aceh berupa Master dan VCD

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 350.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 260.707.700,- (74,49%).

- d. Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data mengenai program terkait penguatan perdamaian yang ada di Kab/Kota maupun di Provinsi Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan rekapitulasi mengenai program penguatan perdamaian Aceh.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 85.360.000,- (85,62%).

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh s.d. tahun 2015 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:



**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN**  
**PENCAPAIAN RENTRA SKPA S.D TAHUN 2015**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOMES ) KEGIATAN ( OUTPUT)	TARGET KINERJA	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ( RENJA SKPD TAHUN n - 1 ) 2015	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA	
			CAPAIAN PROGRAM	KINERJA HASIL PROGRAM	TAHUN LALU ( N-2)				SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
			( RENTRA SKPD )	DAN KELUARAN KEGIATAN	TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN
			TAHUN 2013	S/D TAHUN	SKPD TAHUN	SKPD TAHUN				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ( 5 +7 + 9 )	11 = (10/4)
1 19 1	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan	725,000,000.00	723,900,600.00	563,246,940.00	563,246,940.00	100.00	1,593,632,022.00	2,880,779,562	3.97
1 19 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	1,197,500,000.00	1,126,065,500.00	1,018,813,563.00	1,018,813,563.00	100.00	4,411,844,441.00	6,556,723,504	5.48
1 19 3	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	2,385,000,000.00	2,149,780,220.00	2,995,283,916.00	2,995,283,916.00	100.00	5,368,023,654.00	10,513,087,790	4.41
		Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh						2,200,889,698.00	2,200,889,698	
1 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	1,300,000,000.00	1,286,334,350.00	344,980,576.00	344,980,576.00	100.00	1,140,705,027.00	2,772,019,953	2.13
1 19 5	PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	380,000,000.00	377,189,300.00	428,330,486.00	428,330,486.00	100.00	1,979,458,723.00	2,784,978,509	7.33
1 19 6	PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH	Meningkatnya perdamaian Aceh	1,360,000,000.00	974,166,104.00	830,565,967.00	830,565,967.00	100.00	5,630,609,994.00	7,435,342,065	5.47
1 19 7	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	750,000,000.00	488,212,700.00	997,203,629.00	997,203,629.00	100.00	27,141,406,870.00	28,626,823,199	38.17
1 20 27	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK	Menguatkan kapasitas kelembagaan peka konflik					100.00	727,660,766.00	727,660,766	
1 20 34	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	48,000,000.00	40,720,000.00	75,867,600.00	75,867,600.00	100.00	19,935,853,837.00	20,052,441,437	417.76

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan

Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas tahun 2013 :

a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan yang dilaksanakan :

1) Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kajian terhadap Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah terkini yang disusun oleh Tim Pengkajian Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah

Hasil yang dicapai yaitu:

- Tersedianya hasil kajian terhadap pengembanagn keamanan
- Tersedianya hasil kajian terhadap isu qanun lambaga dan bendera
- Tersedianya hasil kajian terhadap perkembangan Pemilu 2014
- Tersedianya hasil kajian terhadap penentasan kemiskinan.

2) Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi pemantauan keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing yang dilaksanakan di Provinsi sesuai dengan Permendagri No. 49 Tahun 2010 dan Permendagri No 50 Tahun 2010.

Hasil yang dicapai yaitu; adanya dokumen orang asing dan tenaga asing yang melakukan aktifitas di Aceh.

- 3) Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelajar dan Aparatur Pemerintah di Kota Subulussalam

Hasil yang dicapai yaitu; meningkatnya pemahaman dengan berbagi informasi antara sesama peserta dalam penanggulangan bahaya laten miras dan narkoba, sehingga peredaran dan penggunaan narkoba menurun.

- 4) Koordinasi Penanganan Konflik.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat rutin, Rakor dan Sosialisasi terhadap penanganan gangguan keamanan daerah dan penanganan konflik sosial seperti SARA dan lahan sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2013

Hasil yang dicapai yaitu:

- Meredamnya potensi konflik di masyarakat
- Terkendalinya gangguan keamanan di daerah
- Terlaksananya inpres No. 2 Tahun 2013
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap gangguan dan potensi timbulnya konflik sosial di masyarakat

- b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

- 1) Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi ke Kabupaten/Kota dan bantuan hukum bagi masyarakat yang dilakukan pada korban konflik di 10 Kab/Kota

Hasil yang dicapai yaitu:

- Adanya peningkatan pemahaman terhadap HAM dan Hak-hak Bantuan Hukum bagi Masyarakat korban konflik.
- Bantuan hukum korban konflik diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari korban konflik dalam bentuk sosialisasi untuk memperoleh bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

2) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Adanya peningkatan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama
- Adanya keharmonisan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
- Tidak terjadi serta menghindari konflik antar umat beragama.

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk

- a) Dialog kebangsaan,
- b) Dialog pemantapan ideologi kebangsaan dan bela Negara, Pemantapan Wasbang, Hak-hak Bantuan Hukum dan HAM bagi masyarakat melalui dialog interaktif RRI Banda Aceh.
- c) Dialog tentang rancangan qanun Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pemdirian Rumah Ibadah, Pemantapan Wasbang dan tentang Pemeliharaan Kerukunan Kehidupan Beragama melalui TVAceh

Hasil yang dicapai yaitu:

- Terjadi dialog antara narasumber dengan pemirsan TV dan pendengar RRI;
- Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap ideologi kebangsaan dan bela Negara, Pemantapan Wasbang, Hak-hak Bantuan Hukum dan HAM bagi masyarakat.

2) Pemantapan ideologi dan bela Negara.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparatur Pemerintahan

Hasil yang dicapai yaitu:

- Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap ideologi dan bela Negara;
- Adanya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1) Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dengan aparat kecamatan yang membidangi ketertiban umum, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP dan WH serta Badan Kesbangpol dan Linmas setempat.

Hasil yang dicapai yaitu; meningkatnya koordinasi dengan Provinsi dengan Kab/Kota dan lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya satuan Linmas di Kab/Kota.

2) Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap perangkat gampong dan aparat keamanan di 7 Kab/Kota yang diikuti oleh Satuan Linmas Gampong, Geuchik, Imum dan Tuha Peut

Hasil yang dicapai yaitu:

- Meningkatkan rasa tanggung jawab Satlinmas
- Mewujudkan ketentraman dan keamanan dilingkungan masyarakat

3) Penyelenggaraan gampong sadar hukum.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat/Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda/Perempuan sebanyak 60 orang di 10 Kab/Kota.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Terjadinya peningkatan pemahaman arti hukum dan perlakukannya ditengah-tengah masyarakat
- Terciptanya gampong yang memiliki masyarakat sadar akan tatanan kehidupan bermasyarakat.

4) Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Penyusunan dan Penyesuaian Reusam Gampong Berbasis Peka Konflik yang pilot proyek pada 4 Kab/Kota

Hasil yang dicapai yaitu; tersusunnya sebuah pedoman reusam yang akan menjadi bahan dalam mengambil keputusan para tokoh-tokoh adat, tokoh agama dalam rangka mengembangkan dan menjalankan kehidupan gampong yang peka konflik.

e. Pendidikan Politik Masyarakat

1) Sosialisasi kebijakan politik pemerintah Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap kebijakan politik pemerintah Aceh terkait pengembangan politik daerah terkini dan pengembangan kondisi dan situasi daerah berupa lahirnya qanun-qanun Aceh.

Hasil yang dicapai yaitu; terjalinnya Sinergisitas Kebijakan Politik Pemerintah Aceh dengan pemerintah Kab/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya khususnya dalam pemahaman terhadap lahirnya qanun-qanun Aceh.

2) Fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknik kepada pengurus parpol terhadap langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, kewajiban partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota parpol dan masyarakat, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, kewenangan parpol dalam hal terjadinya PAW.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Meningkatnya pemahaman pengurus parpol terhadap hak dan kewajiban Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatnya kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan;
- Maksimalnya fungsi parpol, baik fungsi terhadap masyarakat maupun terhadap serta mampu mengembangkan sistem politik dalam demokrasi yang dilandasi etika dan budaya politik berazaskan Pancasila

3) Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknik berkaitan dengan peran serta, hak dan kewajiban masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum, peran masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak politik, independensi dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Meningkatnya kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam rangka berpolitik
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik.

4) Penguatan kapasitas politik perempuan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan partisipasi perempuan perempuan dalam berpolitik.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Meningkatnya partisipasi perempuan baik dalam kepengurusan parpol maupun keterwakilan di lembaga legislatif
- Meningkatnya kesadaran berpolitik, kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.

5) Penguatan kapasitas organisasi masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan UU Ormas sesuai dengan UU 27 Tahun 2013 dimana fungsi ormas adalah sebagai sarana penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, sebagai penyalur aspirasi masyarakat sehingga terjadinya pemenuhan pelayanan sosial dalam



memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- Adanya perkembangan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam bermasyarakat.
- Melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Paham lagu kebangsaan, tahu lambang kebangsaan)

6) Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada pengurus Parpol, Ormas/LSM berkaitan dengan peran Ormas dalam pembangunan, mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah dan bantuan sosial

Hasil yang dicapai yaitu:

- Memahami bagaimana tatacara bentuk pertanggung jawaban keuangan bantuan hibah dan sosial
- Adanya persatuan persepsi dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.

7) Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi tata cara pendafatara Ormas dan LSM bekaitan Permendagri No 33 Tahun 2012 kepada pengurus Ormas dan LSM

Hasil yang dicapai yaitu:

- Adanya pemahaman tentang tata cara pendirian ormas sesuai dengan Permendagri

8) Koordinasi dan pemantauan organisasi asing.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan pejabat Kesbang Kab/Kota serta instansi terkait terhadap keberadaan organisasi asing yang beroperasi di Aceh.

Hasil yang dicapai yaitu:

- Adanya kesepakatan untuk selalu memantau setiap aktifitas organisasi asing di Kab/Kota masing-masing
- Melakukan koordinasi dengan organisasi asing terhadap aktifitas yang dilakukan di Kab/Kota masing-masing

9) Penyusunan database parpol, ormas, lsm dan lembaga asing.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data Parpol, Ormas, LSM dan Lembaga Asing dalam bentuk database

Hasil yang dicapai yaitu:

- Dokumentasi data Pengurusan Parpol dari Tingkat Kecamatan
- Dokumentasi dan Direktori Lembaga yang terdaftar

f. Program Pembauran Kebangsaan

1) Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi ke siswa/siswi SMA/MAN dan Pesantren di 7 Kab/Kota. Yang dilaksanakan oleh Pokja PWK dari dinas/instansi terkait.

Hasil yang dicapai adanya peningkatan pemahaman terhadap pembauran dan kerukunan umat beragama sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman, etnis, suku, agama, adat istiadat dan kehidupan masyarakat

2) Koordinasi pembauran kebangsaan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat-rapat koordinasi dalam rangka mensikronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota.

Hasil yang dicapai yaitu; terjalinnya komunikasi dan koordinas yang baik antar kabupaten/kota dengan provinsi dalam rangka mencari solusi perencanaan pembangunan kebangsaan ke depan.

g. Program Pengembangan Data dan Informasi

1) Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Pengumpulan dan pengolahan data-data terkait konflik dan kekerasan

Hasil yang dicapai yaitu:

- Tersedianya dokumen konflik
- Tersedianya dokumen pemantauan kekerasan yang terjadi di Aceh bekerja sama dengan SNPK pusat.

h. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh

1) Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk

- a. Focus Group Discussion (FGD) Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh
- b. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka survey dan laporan Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh

Hasil yang dicapai yaitu:

- a) Terlaksananya kegiatan FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 4 Kabupaten
- b) Adanya dokumen hasil survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh

- 2) Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk

- a) Seminar Capaian Penanganan Konflik Aceh berbasis data SNPK
- b) Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh

Hasil yang dicapai yaitu:

- a) Memperkenalkan sistem nasional pemantauan kekerasan kepada Badan Kesbang se Aceh, SKPA, Ormas dan LSM
- b) Terlaksananya Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 2 Kabupaten dengan kesimpulan dan pemahaman terhadap penanganan konflik Aceh

- 3) Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk :

- a) Pembuatan / interior ruang display memorial perdamaian Aceh
- b) Pembuatan dan penggandaan film Memorial perdamaian Aceh

Hasil yang dicapai yaitu:

- a) Tersedianya ruangan Display Memorial Perdamain Aceh
- b) Tersedianya Film Dokumenter Memorial Perdamain Aceh berupa Master dan VCD

- 4) Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data mengenai program terkait penguatan perdamaian yang ada di Kab/Kota maupun di Provinsi Aceh

Hasil yang dicapai yaitu; berupa laporan rekapitulasi mengenai program penguatan perdamaian Aceh

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
				TAHUN (THN - 2 ) 2013	TAHUN (THN - 1 ) 2014	TAHUN (THN n ) 2015	TAHUN (THN n + 1 ) 2016	TAHUN (THN n - 2 ) 2013	TAHUN (THN n-1) 2014	TAHUN (THN n ) 2015	TAHUN (THN n+1 ) 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		IKK	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah		IKK	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah.

Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi. Berikut beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas:

#### I. Bidang Politik Kemasyarakatan

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perdamaian yang di Aceh. Hal ini terlihat dengan masih maraknya tindakan-tindakan anarkis yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk tindakan provokatif, hujatan serta prasangka dan bahkan tindakan anarkis menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.
3. Masih rendahnya peran ormas dan LSM sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh.
4. Masih rendahnya peran media masa dalam penyebaran informasi terkait pelaksanaan perdamaian di Aceh.

## II. Bidang pematapan Idiologi dan Kebangsaan

1. Timbulnya fenomena luntarnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, padahal pematapan dan peningkatan wawasan dan kesadaran kebangsaan sangat dibutuhkan dalam rangka menopang kokohnya integrasi dan ketahanan bangsa dalam rangka mempertahankan tegaknya NKRI.
2. Memudarnya pemahaman hak azazi manusia dikalangan masyarakat dikarenakan belum berkembangnya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azazi manusia.
3. Telah terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Hal ini mengindikasikan bahwa krisis multi dimensi yang masih kita hadapi memerlukan penanganan yang konseptual dan komprehensif, bahkan diperlukan terobosan atau strategi baru yang memungkinkan bangsa Indonesia mengalami perubahan yaitu suatu era baru yang demokratis, beradab dan lebih sejahtera. Dengan demikian kiranya pendekatan budaya yang menyentuh hal yang paling mendasar dari sumber daya manusia, utamanya akhlak atau nurani kebangsaan menjadi titik sentral, karena memiliki peran yang amat strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Upaya pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan perantara sosial yang ada didalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi, hal ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa, keadaan tersebut disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai- nilai didalam kehidupan masyarakat.

4. Toleransi dan kerukunan umat beragama perlu ditingkatkan terutama di daerah perbatasan. Hal ini dikarenakan potensi timbulnya orientasi primordial (bermacam suku, ras dan agama) yang tinggi di daerah tersebut.

### **III. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan**

1. Masih adanya ancaman terorisme yang perlu diwaspadai. Hal ini memerlukan langkah-langkah strategis, salah satunya yaitu melalui kerjasama dengan aparat keamanan dan instansi terkait. Disamping itu juga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya terorisme.
2. Masih maraknya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi. Hal ini ditandai dengan masih terjadinya ancaman, intimidasi, teror dan bahkan tindakan anarkis dalam berpolitik. Hal tersebut tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas keamanan di Aceh.
3. Kehadiran banyak partai politik disisi lain dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan bangsa dan masyarakat, sehingga timbul pergeseran sikap yang menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
4. Lemahnya penegakan hukum dan pengamanan hukum berlangsung secara tidak adil dan diskriminatif.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPA**

RKPA tahun 2015 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2015. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas



Aceh 2012-2017 dan merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas.

Adapun perbandingan antara RKPA 2015 dengan rancangan awal usulan SKPA Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh sesuai tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2015**

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Aceh	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan	30%	1,593,632,022.00	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Aceh	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan	30%	1,593,632,022.00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Aceh	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	15%	4,411,844,441.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Aceh	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	15%	4,411,844,441.00	
3	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Aceh	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	30%	5,368,023,654.00	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Aceh	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	30%	5,368,023,654.00	
		Aceh	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh	40%	2,200,889,698.00		Aceh	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh	40%	2,200,889,698.00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Aceh	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	30%	1,140,705,027.00	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Aceh	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	30%	1,140,705,027.00	
5	PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN	Aceh	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	30%	1,979,458,723.00	PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN	Aceh	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	30%	1,979,458,723.00	
6	PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH	Aceh	Meningkatnya perdamaian Aceh	80%	5,630,609,994.00	PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH	Aceh	Meningkatnya perdamaian Aceh	80%	5,630,609,994.00	
7	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Aceh	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	40%	27,141,406,870.00	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Aceh	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	40%	27,141,406,870.00	
8	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK	Aceh	Menguatkan kapasitas kelembagaan peka konflik	40%	727,660,766.00	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK	Aceh	Menguatkan kapasitas kelembagaan peka konflik	40%	727,660,766.00	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Aceh	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	30%	19,935,853,837.00	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Aceh	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	30%	19,935,853,837.00	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh pada tahun 2015 tidak melaksanakan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh, namun hanya selaku SKPA yang memverifikasi dana hibah dan bantuan sosial kepada pemangku kepentingan yang terkait. Terkait dengan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota dalam pelaksanaan musrenbang tidak/belum ada yang langsung ditujukan kepada Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh.



### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1.  
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4

Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh belum melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang direncanakan.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Aceh, maka visi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh adalah :

*“ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tentram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT”.*

Penjabaran makna dari visi ini adalah :

1. Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Suatu kondisi yang aman, bersatu, kokoh, demokrasi dan tertib yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air

2. Masyarakat Aceh

Suatu kondisi masyarakat yang utuh atau tidak terpecah belah, bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi

3. Yang Demokratis

Sikap dan kondisi Pemerintah Aceh yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

4. Tertib dan Tentram berlandaskan UUPA

Setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan Pemerintah dan Masyarakat yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem UUPA yang esensial untuk menciptakan sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju

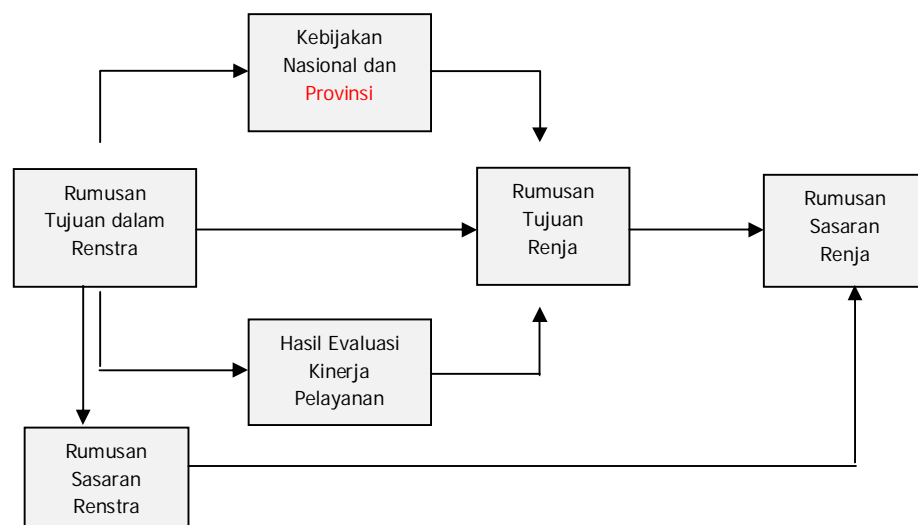
5. Dibawah Ridho Allah SWT

Sikap dan kondisi masyarakat Aceh yang senantiasa menyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridho Allah SWT.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh disusun dengan mempedomani rumusan tujuan Renja, sebagaimana dilustrasikan sebagai berikut :



Misi akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, dan apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Adapun misi daripada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur yang berdaya guna sehingga terampil dan mampu dalam penanganan berbagai aspek kebutuhan publik.
- ❖ Melestarikan budaya politik yang santun dan demokratis dalam mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dinamis dan beretika
- ❖ Memperkuat pondasi kebangsaan yang berwawasan dan toleransi serta hidup rukun terhadap sesama.
- ❖ Terjamin pelayanan yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan terjaganya kondisi daerah yang kondusif.
- ❖ Memperkuat pondasi perdamaian Aceh yang bermartabat berlandaskan UUPA sebagai wujud dari MoU Helsinki

### **3.2.1. Tujuan**

1. Mewujudkan Hubungan Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;
4. Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat;
5. Mewujudkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara;
6. Meminimalisir Potensi Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;
7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8. Memantapkan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.

### **3.2.2. Sasaran**

1. Terlaksananya Hubungan Kerjasama Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.



4. Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
5. Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
6. Tersedianya Sistem Informasi Potensi Konflik dan Isu-Isu Strategis.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
8. Optimalisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dan membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang berkualitas terutama dalam mensosialisasikan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki sehingga keberlanjutan perdamaian di Aceh terlaksana dengan baik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi , pada dasarnya kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh adalah sebagai *"pengarah"* setiap program pembangunan dan keberlanjutan perdamaian yang akan memberikan kemudahan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Sejalan dengan Visi Pemerintah Aceh tahun 2012 – 2017 yaitu ***"ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI "*** maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tahun 2015 terdiri dari :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2015**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>5</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur	Banda Aceh	90%	<b>8,685,011,392.00</b>	APBA		90%	9,553,512,531.20
5	Gaji dan Tunjangan				5,300,311,392.00				5,830,342,531.20
5	Uang Makan Harian				471,900,000.00				519,090,000.00
5	Tunjangan Prestasi Kerja (TFK)				2,769,700,000.00				3,046,670,000.00
5	<i>Uang Mengang</i>								-
	- PNS				117,000,000.00				128,700,000.00
	-Non PNS				26,100,000.00				28,710,000.00
<b>1</b>	<b>PELAYANAN ADM PERKANTORAN</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Banda Aceh	80%	<b>4,844,863,511.00</b>	APBA		83%	5,329,349,862.10
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21,186,000.00				23,304,600.00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				350,640,000.00				385,704,000.00
1	Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,506,600.00				28,057,260.00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor				174,655,560.00				192,121,116.00
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				33,480,000.00				36,828,000.00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				16,580,880.00				18,238,968.00
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				593,400,000.00				652,740,000.00
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				32,396,000.00				35,635,600.00
1	Penyediaan makanan dan minuman				33,000,000.00				36,300,000.00
1	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				2,156,894,871.00				2,372,584,358.10
1	Penyediaan jasa dokumentasi kantor				212,400,000.00				233,640,000.00
1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran				1,194,723,600.00				1,314,195,960.00

1	19	2		<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN</b>	Meningkatnya pelayanan Publik	Banda Aceh	80%	<b>3,035,644,800.00</b>	APBA		83%	3,339,209,280.00
1	19	2	05	Pembangunan Gedung kantor				1,453,324,800.00				1,598,657,280.00
1	19	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				256,920,000.00				282,612,000.00
1	19	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				233,100,000.00				256,410,000.00
1	19	2	42	Rehab sedang/berat gedung kantor				926,760,000.00				1,019,436,000.00
1	19	2	46	Penunjang dan pembinaan kelembagaan				165,540,000.00				182,094,000.00
1	19	3		<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Meningkatnya Disiplin aparatur	Banda Aceh	80%	<b>121,200,000.00</b>	APBA		83%	133,320,000.00
1	19	3	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				121,200,000.00				133,320,000.00
1	19	5		<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Meningkatnya SDM Aparatur	Banda Aceh	80%	<b>30,000,000.00</b>	APBA		83%	33,000,000.00
1	19	5	01	Pendidikan dan pelatihan formal				30,000,000.00				33,000,000.00
1	19	6		<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Tercapainya kinerja perkantoran	Banda Aceh	80%	<b>270,000,000.00</b>	APBA		83%	297,000,000.00
1	19	6	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				185,000,000.00				203,500,000.00
1	19	6	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				85,000,000.00				93,500,000.00
1	19	1		<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Aceh	54%	<b>870,000,000.00</b>	APBA		62%	957,000,000.00
				Seminar, talk show , diskusi peningkatan wawasan kebangsaan				450,000,000.00				495,000,000.00
				Pemantapan ideologi dan bela negara				420,000,000.00				462,000,000.00

1	19	2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	Aceh	36%	1,437,000,000.00	APBA	43%	1,580,700,000.00
			Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat				177,000,000.00			194,700,000.00
			Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan				480,000,000.00			528,000,000.00
			Penyelenggaraan gampong sadar hukum				540,000,000.00			594,000,000.00
			Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik				240,000,000.00			264,000,000.00
1	19	3	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	Aceh	54%	2,862,000,000.00	APBA	62%	3,148,200,000.00
			Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh				612,000,000.00			673,200,000.00
			Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSMAceh				270,000,000.00			297,000,000.00
			Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM				240,000,000.00			264,000,000.00
			Koordinasi dan pemantauan organisasi asing				120,000,000.00			132,000,000.00
			Penyusunan database paarpol, ormas, lsm dan lembaga asing				300,000,000.00			330,000,000.00
			Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol				300,000,000.00			330,000,000.00
			Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik				300,000,000.00			330,000,000.00
			Penguatan kapasitas politik perempuan				480,000,000.00			528,000,000.00
			Penguatan kapasitas organisasi masyarakat				240,000,000.00			264,000,000.00
1	19	4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	Aceh	54%	1,560,000,000.00	APBA	62%	1,716,000,000.00
			Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia				1,320,000,000.00			1,452,000,000.00
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				240,000,000.00			264,000,000.00

1	19	5		<b>PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN</b>	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	Aceh	54%	456,000,000.00	APBA	62%	501,600,000.00
				Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama				300,000,000.00			330,000,000.00
				Koordinasi pembauran kebangsaan				156,000,000.00			171,600,000.00
1	19	6		<b>PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH</b>	Meningkatnya perdamaian Aceh	Aceh	86%	1,632,000,000.00	APBA	88%	1,795,200,000.00
				Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh				546,000,000.00			600,600,000.00
				Konferensi/seminar/lokakarya/ dialog capaian penanganan konflik Aceh				546,000,000.00			600,600,000.00
				Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian				420,000,000.00			462,000,000.00
				Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian				120,000,000.00			132,000,000.00
1	19	7		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	Aceh	28%	900,000,000.00	APBA	24%	990,000,000.00
				Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah				120,000,000.00			132,000,000.00
				Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing				120,000,000.00			132,000,000.00
				Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba				120,000,000.00			132,000,000.00
				Koordinasi Penanganan Konflik				540,000,000.00			594,000,000.00
1	20	27		<b>PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK</b>	Menguatkan kapasitas kelembagaan peka konflik	Aceh	55%		APBA	60%	
1	20	34		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	Aceh	54%	57,600,000.00	APBA	62%	63,360,000.00
				Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik				57,600,000.00			63,360,000.00
<b>JUMLAH</b>								<b>26,761,319,703.00</b>			<b>29,437,451,673.30</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh 2012-2017 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Aceh serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2015.

Rencana Kerja Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2015 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBA Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPA yang membidangi fungsi lain.

Banda Aceh, Maret 2014  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600219 19980011001